



Organisasi Perburuhan Internasional - Jakarta
International Labour Organization – Jakarta

Selasa, 22 Juni 2010
Untuk diberitakan segera

SIARAN PERS

Lokakarya Tingkat Regional: Pekerjaan yang Layak Dalam Industri Perhutanan Indonesia

SURABAYA (BERITA ILO): Kantor ILO Jakarta bekerjasama dengan FSP KAHUTINDO, APINDO dan BWI telah menyelenggarakan sebuah lokakarya tingkat regional tentang pekerjaan yang layak dalam industri perhutanan Indonesia di Hotel Ciputra Golf Club, Surabaya, pada hari Senin-Selasa, 21-22 Juni 2010.

Acara tersebut menghadirkan wakil-wakil dari pemerintah termasuk dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Badan Pengembangan dan Perencanaan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, dan juga wakil dari pengusaha dan pekerja serta lembaga donor untuk menyoroti pentingnya isu yang berkaitan dengan pembalakan liar, pekerjaan ramah lingkungan dan masalah perburuhan yang terkait dalam sektor kehutanan.

Sebagai negara dengan industri kehutanan terbesar di kawasan Asia Pasifik, Indonesia memainkan peran penting dalam geopolitik, ekonomi dan konteks perubahan iklim. Hutan dan industri hasil hutan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto, devisa, pendapatan pemerintah dan kesempatan kerja pada periode 1980-2002.

Terlepas dari kenyataan bahwa ada potensi untuk usaha bagi perusahaan dan penciptaan lapangan kerja di bidang kehutanan dalam sepuluh tahun berikutnya, baru-baru ini sektor tersebut telah mengalami penurunan dan perubahan struktural dan juga menyebabkan masalah-masalah lain yang rumit. Produktivitas industri hutan Indonesia rendah, sementara limbah yang dihasilkan di pabrik pengolahan tinggi. Hal ini menyebabkan menurunnya output dan daya saing internasional. Sektor perusahaan pengolahan kayu yang dililit hutang dan ada peningkatan pemecatan di antara para pekerja pabrik. Isu penting lainnya adalah pembalakan liar dan konsekuensinya, baik bagi perusahaan dan pekerja.

Lembaga Buruh Internasional mengungkapkan bahwa ada satu juta pekerja sektor formal kehutanan di Indonesia pada tahun 2001. Namun, Departemen Kehutanan Indonesia (Dephut) melaporkan bahwa 150.000 orang kehilangan pekerjaan mereka dalam industri hutan pada tahun 2003, dan bahwa angka ini meningkat menjadi 600.000 tahun 2004 karena kekurangan kayu. MPI (Masyarakat Kehutanan Indonesia) melaporkan bahwa 60% dari karyawan hutan kehilangan pekerjaan mereka pada tahun 2005 untuk alasan yang sama. Hilangnya pekerjaan disektor ini berhubungan dengan kerusakan hutam alam di Indonesia.

The State of the World's Forest 2009 melaporkan dari jumlah 321.000 pekerja yang berkaitan dengan hutan di Indonesia, membuat sekitar 0,3% dari total angkatan kerja negara. Menariknya, FAO menerbitkan Kertas Kerja pada tahun 2009 tentang Studi Ramalan tentang Hutan Indonesia, memperkirakan bahwa jumlah yang signifikan pada kisaran 675 sampai 836.000 lapangan kerja akan diciptakan di sektor kehutanan pada tahun 2009-2020 meskipun mungkin ada jumlah orang yang lebih banyak lagi yang "bergantung pada hutan" dan juga orang-orang yang bekerja di penggergajian kayu skala kecil dan industri kayu olahan.

Pekerjaan di sektor kehutanan pada umumnya dianggap tidak dilaporkan secara akurat (underreported), terutama karena sifat pekerjaan yang bersifat musiman. Seringkali paruh waktu dan tidak diterjemahkan dengan baik ke pekerjaan penuh-waktu. Sebagian besar pekerja di sektor kehutanan formal adalah laki-laki, tapi jenis pekerjaan tertentu, seperti penghijauan, pengumpulan bahan bakar kayu dan agro-kehutanan mencakup pekerja wanita dengan jumlah yang terus bertambah.

Isu-isu dalam rangka ekonomi yang ramah lingkungan, ditujukan melalui adopsi "Kerangka Kerja Transisi yang adil" (Just Transition Framework) di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Copenhagen 2009 untuk perubahan yang adil dan berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon. Kerangka kerja transisi termasuk mempertahankan kuantitas dan kualitas pekerjaan melalui penerapan pekerjaan yang layak dalam bentuk hak-hak di tempat kerja, kesempatan kerja, perlindungan sosial dan dialog.

Industri kehutanan perlu diperkuat tidak hanya berdasarkan kapasitas ekologis dan ekonomis, tetapi juga melalui kualitas kerja dan akuntabilitas sosial lainnya

Untuk informasi lebih lanjut tentang lokakarya regional mengenai pekerjaan yang layak di industri perhutanan Indonesia, silahkan menghubungi

Tauvik Muhammad
Programme Officer
Kantor ILO Jakarta
Tel. (021) 3913112 ext. 122
Mobile : +62811 910 1145
Email: tauvik@ilo.org

Josephine Imelda
Asisten Komunikasi
Kantor ILO Jakarta
Telp. (021) 39139112 ext.115
Mobile : +62857 101 86867
Email : gita@ilo.org
